

**PENGARUH SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Desa Yang Ada Di Kecamatan Dolok
Sigompulon)**

Oleh
MUHAMMAD HAFILY RITONGA
NIM 0502163190

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Desa Yang Ada Di Kecamatan Dolok Sigompulon)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

Oleh:

MUHAMMAD HAFILY RITONGA

NIM : 0502163190

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

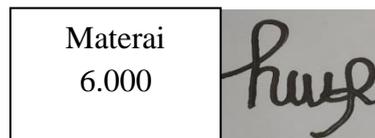
Nama : Muhammad Hafily Ritonga
Nim : 0502163190
Tempat/Tgl. Lahir : Salusuhan/ 24 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Salusuhan Kecamatan Dolok Sigompulon
Kabupaten Padang Lawas Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 08 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan



Muhammad Hafily Ritonga

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Desa Yang Ada Di Kecamatan Dolok Sigompulon)**

Oleh :

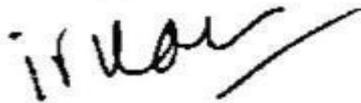
MUHAMMAD HAFILY RITONGA

Nim : 0502163190

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 23 Juni 2020

Pembimbing I



M. Irwan Padli Nasution, ST,MM,M.Kom

NIDN. 2013027501

Pembimbing II



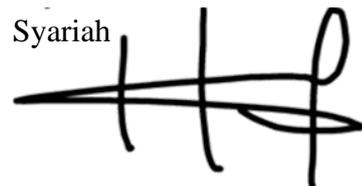
Rahmat Daim Harahap, M.Ak

NIDN. 0216099001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Syariah



Hendra Harmain, S.E,M.Pd

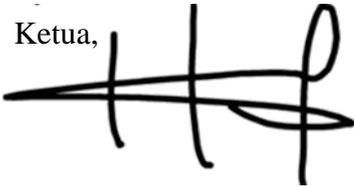
NIDN. 2010057302

Skripsi Berjudul “**PENGARUH SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Desa Yang Ada Di Kecamatan Dolok Sigompulon)** an. Muhammad Hafily Ritonga, NIM 0502163190 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 08 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 08 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,



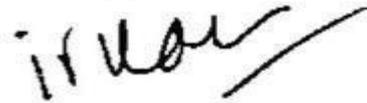
Hendra Harmain, S.E,M.Pd
NIDN. 2010057302

Kusmilawaty,



Kusmilawaty,SE,Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001

Anggota



M. Irwan Padli Nasution, ST,MM,M.Kom
NIDN. 2013027501



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0216099001



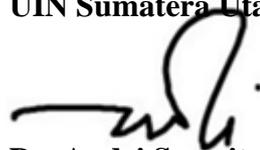
Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602



Tuti Anggraini, MA
NIDN. 20310577

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 200705760

ABSTRAK

Muhammad Hafily Ritonga, NIM 0502163190. “Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon)”. Di bawah bimbingan Bapak M. Irwan Padli Nasution, MM., M.Kom sebagai Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial dan simultan. Mengkaji pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sampel *purposive sampling*. Kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut sebanyak 60 kuisisioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 22.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan nilai determinasi sebesar 79,1 %.

Kata Kunci: Sistem Komputerisasi Akuntansi, Pengawasan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon)”**. Tahun ajaran 2019/2020.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor UIN-SU Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah beserta seluruh staf pegawainya.
4. Bapak M. Irwan Padli Nasution, MM, M.Kom selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.

5. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Ibu Arnida Wahyuni Lubis M.Si selaku dosen pembimbing proposal yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan proposal sampai selesai.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Rancok Ritonga dan Ibunda Siti Hawa Rambe yang telah mendoakan, mengorbankan dan menginspirasi secara moril dan material.
8. Terima kasih kepada adik tersayang Abdul Rois Ritonga dan Abdi Syahputra Ritonga dan Hanif Fauzan Ritonga yang telah memberi dukungan untuk penulis dan menemani dalam penulisan skripsi.
9. Terima kasih kepada seluruh Kepala Desa dan perangkat desa Sekecamatan Dolok Sigompulon yang telah banyak membantu penulis dengan memberi izin untuk memperoleh data agar skripsi ini cepat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus kepada AKS-E serta teman-teman yang sering mensupport saya dalam perjuangan selama perkuliahan atau dalam pembuatan skripsi ini yaitu Nairoha Juwita Pane, Erlinda Sari Harahap dan Siti Aminah Ritonga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis	10
1. Laporan Keuangan.....	10
a. Kualitas Laporan Keuangan	10
b. Tujuan Laporan Keuangan	11
c. Karasteristik Laporan Keuangan	12
2. Sistem Komputerisasi Akuntansi.....	15
a. Sistem Informasi Akuntansi	15
b. Sistem Akuntansi Berbasis Komputer.....	17
c. Software atau Aplikasi Akuntansi	18
d. Kriteria Program Akuntansi yang Berkualitas.....	20
3. Pengawasan Keuangan Daerah.....	23
a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah.....	23

b. Lingkungan Pengawasan	24
c. Lembaga Pengawas Keuangan Daerah.....	27
B. Kajian Terdahulu	29
C. Kerangka Teoritis	34
D. Hipotesa	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	39
G. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian.....	51
B. Deskripsi Data Penelitian.....	53
C. Hasil Penelitian.....	55
1. Analisis Statistik Deskriftif.....	55
2. Uji Kualitas Data.....	55
3. Uji Asumsi Klasik.....	58
4. Uji Regresi Linear.....	61
5. Uji Hipotesis.....	62
6. Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.2 Jumlah SKPD kecamatan Dolok Sigompulon	41
Tabel 3.3 Jumlah Sampel Penelitian	42
Tabel 3.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian	43
Tabel 4.1 Hasil Penyaringan Sampel	52
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	52
Tabel 4.3 Kategori Responden	53
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden	53
Tabel 4.5 Tingkat Usia Responden	54
Tabel 4.6 Lama Bekerja	54
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sistem Komputerisasi Akuntansi	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Komputerisasi Akuntansi .	57
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah.....	58
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (Uji t)	63
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (Uji f)	64
Tabel 4.20 Hasil Uji Determinan (Uji R ²)	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	37
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, pelaporan keuangan sangat diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.¹

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Sebagai salah satu informasi yang paling berguna dalam rangka pengambilan keputusan maka laporan keuangan haruslah berkualitas. Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan salah satu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

¹Deddi Nordiawan, *et al*, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 151.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan aktif untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu informasi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, pada kenyataannya permasalahan di dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat masih sering terdapat permasalahan dan keraguan akan kebenarannya.

Dewasa ini akuntansi khususnya mengenai penyajian laporan keuangan tidak lagi dikerjakan secara manual akan tetapi sudah menggunakan aplikasi komputer sebagai media pendukung. Dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer tersebut seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk sekedar menguasai ilmu akuntansi, namun lebih dari itu seorang akuntan juga harus menguasai ilmu komputer yang akan membantunya dalam mengerjakan setiap kegiatan proses akuntansi.

Sistem komputerisasi akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi.

Istilah sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna.²

² George H. Bodnar and William S. Hopwood, *Accounting Information Systems Ninth Edition*, Ter. Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal.6

Teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai terobosan dalam pemanfaatan teknologi hampir semua bidang kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan diterapkannya sistem komputerisasi akuntansi di instansi pemerintahan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.³

Komputer sebagai media teknologi informasi harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pemakainya. Misalnya, dalam Pengelolaan Keuangan desa komputer menjadi salah satu penunjang keberhasilan desa dalam menyusun laporan keuangannya. Perangkat desa senantiasa harus siap dengan tantangan perkembangan dari kemajuan teknologi informasi tersebut, terutama dalam hal sistem komputerisasi akuntansi, yang menuntut perangkat desa harus tanggap dalam menghadapinya.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan desa sudah menggunakan sistem berbasis aplikasi. Adapun aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri nomor 145/8350/BPD tahun 2015. Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut “SISKEUDES” (Sistem Keuangan Desa) yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama SIMDA Desa. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

³ Irfan Ikhwanul Haza, “ Pengaruh Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota Padang)”.(Artikel, S1 Universitas Negeri Padang, 2011), hal. 3

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi dengan adanya Pengawasan Keuangan Daerah. Pengawasan Keuangan Daerah dibutuhkan untuk memastikan apakah sistem yang direncanakan berjalan dengan baik, demi tercapainya laporan keuangan yang sesuai dengan standart. Pengawasan keuangan daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dilakukan agar berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat ke daerah. Kasus di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*).

Pengawasan oleh DPRD dan masyarakat tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi,

DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD.⁴

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.⁵

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti kegiatannya, SKPD dituntut agar meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *Value For Money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sendiri merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kecamatan Dolok Sigompulon terdiri dari 44 desa, yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Masing-masing desa di Kecamatan Dolok Sigompulon mempunyai laptop, untuk mendukung program

⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 214.

⁵ Irfan Ikhwanul Haza, “ Pengaruh Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota Padang)”.(Artikel, S1 Universitas Negeri Padang, 2011), hal. 6

pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk menyusun laporan keuangan desa. Pengawasan Keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Padang Lawas Utara, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan masyarakat.

Fenomena yang dapat di amati di Kecamatan Dolok Sigompulon adalah kurang optimalnya penyuluhan dan pelatihan perangkat desa tentang pemakaian sistem komputerisasi akuntansi untuk menyusun laporan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang sudah berbasis komputer. Banyak terjadi kasus dimana ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa pada setiap periode anggaran. Padahal jika diperhatikan dengan adanya sistem komputerisasi akuntansi akan mempermudah kerja para perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desanya masing-masing. Bukan hanya keterlambatan pelaporan keuangan desa, tapi sering pula di dapati adanya laporan keuangan desa dari beberapa desa yang ditolak oleh Seketaris Camat (Sekcam), hal itu dikarenakan sering dijumpai kesalahan-kesalahan di dalam laporan keuangan desa tersebut.

Di sisi lain, pengawasan keuangan daerah di kecamatan dolok sigompulon juga masih kurang optimal, hal itu dapat diperhatikan adanya beberapa proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya. Penemuan infrastruktur yang rusak bahkan sebelum mencapai umur satu tahun sering terjadi. Padahal infrastruktur tersebut diharapkan bisa bertahan lama agar manfaatnya bisa digunakan masyarakat untuk waktu yang lebih lama juga. Pembangunan infrastruktur lebih banyak di pembangunan jalan desa. Ada beberapa kasus ditemukan ukuran bangunan tidak mencapai target dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun dari pihak pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sudah mengupayakan agar resiko-resiko tersebut dapat diperkecil, hal itu dapat dilihat dari banyaknya wartawan-wartawan yang turun serta ke desa untuk mengawasi pembangunan dan pelaporan keuangan daerah.

Akibat dari lemahnya kemampuan perangkat desa untuk menyusun laporan keuangan desanya sendiri dengan berbasis komputerisasi, maka sering ditemukan adanya beberapa desa yang menyewa operator dari luar untuk menyusun laporan keuangan yang setiap periode anggarannya akan dilaporkan. Hal ini justru akan menambah biaya operasional desa. Sehingga berakibat adanya biaya tambahan dari anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, Kejadian itu sudah pasti akan berpengaruh ke pembangunan proyek yang akan dibangun, karena biaya yang digunakan untuk pembangunan proyek akan berkurang, sebab adanya pembayaran untuk operator penyusunan laporan keuangan desa. Sehingga berakibat pada pengurangan kualitas dari pembangunan proyek tersebut, bahkan juga ditemukan ada beberapa proyek yang tidak sesuai dengan rencana anggaran sebelumnya.

Sebelumnya banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Irfan Ikhwanul Haza pada tahun 2011 yang judulnya “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang)” menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Silviana pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat” menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aswandi pada tahun 2016 berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang)” yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa yang Ada di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah kecamatan dolok sigompulon belum memadai.
2. Kurangnya Penyuluhan pemerintah kepada desa-desa tentang penggunaan komputer (Siskeudes) dalam penyusunan laporan keuangan desa.
3. Adanya penemuan laporan keuangan desa yang di tolak, karena terdapat kesalahan di dalam laporan keuangannya.
4. Adanya penemuan proyek bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa yang di pengaruhi oleh faktor faktor yaitu Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Dolok Sigompulon ?

2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Dolok Sigompulon?
3. Apakah sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Dolok Sigompulon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh sistem komputerisasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Dolok Sigompulon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Dolok Sigompulon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa Kecamatan Dolok Sigompulon.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain :

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

- b. Bagi Pemerintahan Daerah Kecamatan Dolok Sigompulon

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi mengenai pentingnya sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kecamatan Dolok Sigompulon dapat meningkatkan

sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah supaya tercapainya Laporan Keuangan yang berkualitas.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan representatif bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku supaya laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

b. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang digunakan sebagai pelaporan aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi suatu pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi para pemakainya.⁶

Kualitas laporan keuangan tercermin dari karesteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah karesteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat

⁶ Kusmilawati, *et al*, *Analisa Laporan Keuangan* (Medan: Madenatera, cet 2, 2018), hal. 5

normatif yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran kita harus menyempurnakan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah: QS. Al-Israa' : 35, yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷ (QS. Al-Israa' :35)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep islam dapat didefenisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan

⁷ Fahd ibn ' Abd al 'Aziz Al Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penaung Umum Al-Mujamma', 1971), hal. 429

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.⁸

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan-pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan terhadap manajemen.

d. Karakteristik Laporan Keuangan

Adapun empat karakteristik laporan keuangan yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

- 1) Dapat dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

⁸ Hendra Harmain, *et, al, Pengantar Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), hal. 20

2) Dapat dibandingkan

Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan antarperiode dan membandingkannya dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antarperiode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antarperiode dan konsisten dengan entitas lain. Hal itu memerlukan konsistensi kebijakan akuntansi. Standar akuntansi juga diperlukan agar pengukuran dan penyajian informasi sama antar-entitas yang berbeda.

Implikasi karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan akuntansi serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi antarperiode dan dengan entitas yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas, membantu pencapaian daya banding. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata sehingga menghambat penerapan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Entitas tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan serta menggantinya dengan kebijakan baru yang lebih sesuai. Entitas juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi yang ada jika terdapat alternatif lain yang lebih relevan dan andal.

3) Relevan

Relevan berhubung dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntan sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan

seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika dapat meramalakan kemampuan entitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu. Selain itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Informasi yang relevan :

a) Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi/kejadian mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

4) Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai

penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas untuk mengakui seluruh tuntutan dalam laporan posisi keuangan, meskipun tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.⁹

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

1) Sistem Komputerisasi Akuntansi

Sistem Komputerisasi Akuntansi adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Irfan Ikhwanul Haza dan Hasnidar membuktikan bahwa sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mana menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem komputerisasi akuntansi yang efektif dan efisien akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.¹⁰

2) Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah dapat di definisikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kandungan nilai informasi yang berkualitas. Irfan Ikhwanul Haza membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah

⁹ Dwi Martani, *et, al, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, cet 2, 2017), hal. 36-39

¹⁰ Irfan Ikhwanul Haza, “Pengaruh Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota Padang)”. (Artikel, S1 Universitas Negeri Padang, 2011)

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mana semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.¹¹

2. Sistem Komputerisasi Akuntansi

a. Sistem Informasi Akuntansi

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.¹²

Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut

Mengumpulkan transaksi dan data lain serta memasukkannya kedalam sistem, yaitu:

- 1) Memproses data transaksi
- 2) Menyimpan data untuk keperluan dimasa mendatang
- 3) Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan dikomputer.
- 4) Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermamfaat untuk

¹¹ Irfan Ikhwanul Haza, “Pengaruh Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota Padang)”.(Artikel, S1 Universitas Negeri Padang, 2011) hal. 14

¹² Silviana, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat”, (Jurnal Profita Vol. 6 No. 1, 2014), hal. 2

merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.¹³ Pada umumnya dapat dikatakan bahwa informasi yang bernilai paling tinggi adalah informasi yang mengandung ketidakpastian paling rendah. Akan tetapi informasi merupakan salah satu sumberdaya yang tersedia bagi manajer yang tidak bisa terbebas dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara biaya untuk memperoleh sumber daya itu dengan nilai yang dapat dipetik dengan tersedianya sumberdaya itu sendiri. Dengan kata lain, informasi baru dapat disiapkan bilamana, 1) biayanya lebih rendah daripada tambahan pendapatan nyata yang dihasilkannya, 2) mengurangi biaya nyata dengan jumlah yang lebih besar daripada biaya biayayang ditimbulkannya, dan 3) menghasilkan manfaat tidak nyata seperti pandangan yang lebih luas, waktu reaksi yang cepat, jasa pelanggan yang lebih baik, dan lain-lainnya, di mana pemakai informasi itu mempertimbangkan bahwa biaya yang dikeluarkannya memang tidak sia-sia.

Organisasi sangat bergantung pada sistem informasi agar selalu dapat kompetitif. Informasi merupakan sumber daya (*resources*) yang arti pentingnya sama dengan pabrik dan peralatan. Produktivitas, sebagai alat untuk menjaga daya saing, dapat ditingkatkan dengan bantuan informasi. Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi.¹⁴

Banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menghendaki informasi mengenai satuan perusahaan. Sebagian terbesar, informasi yang disediakan untuk para pemakai ekstern ada bersifat “wajib/perintah” (*mandatory*) atau “penting” (*essential*).

¹³Katty Aryanti. Martina, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)”, (E-journal Universitas Komputer Indonesia, 2014), hal. 3

¹⁴ George H. Bodnar dan William S. Hopwood (ed.) *Sistem Informasi Akuntansi*, (t.t.p: Pt. Indeks, 2003), hal. 1

Kendala untuk menghasilkan informasi yang berguna terletak pada lingkungan sistem informasi akuntansi dan struktur manfaat dan biaya yang melekat pada keputusan-keputusan pemakai. Adanya ketidakpastian lingkungan di tempat pengembangan dan penyajian informasi menyebabkan perlunya dilakukan estimasi dan penyesuaian-penyesuaian. Tidak ada sistem informasi yang dapat menghindari segi-segi praktis penyajian informasi. Jika biaya pembuatan informasi lebih besar dari manfaat bagi pemakai, maka tidaklah praktis untuk menyajikan informasi.¹⁵

Sistem informasi dianggap sebagai faktor penting dalam pencapaian kinerja yang lebih besar terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif.

b. Sistem akuntansi Berbasis Komputer

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk perubahan organisasi. Penerapan teknologi tingkat rendah dari perubahan yang terjadi pada organisasi disebut *otomatisasi*, sedangkan penerapan teknologi tingkat tinggi disebut rancang ulang. Otomatisasi menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Sistem yang otomatis mencoba untuk menyederhanakan proses manual tradisional. Rancang ulang, pada sisi lain, meliputi perubahan mendasar pola pikir atas proses bisnis dan alur pekerjaan. Tujuan dari rancang ulang adalah mengurangi beban perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Hal ini meliputi penggantian prosedur tradisional dengan prosedur yang inovatif dan kadang kala akan sangat berbeda dari yang pernah dijalankan sebelumnya.¹⁶

¹⁵ Ibid., hal. 3

¹⁶ James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 206-

Berdasarkan permendagri No. 59 Tahun 2007 Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.¹⁷

Sistem informasi berbasis komputer dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu : sistem *batch*, dan sistem *real time*. Sistem *Batch* terdapat jeda antara waktu terjadinya kegiatan ekonomi dengan waktu pencatatannya dan umumnya menggunakan lebih sedikit sumber daya (peranti keras, pemrograman, pelatihan) yang dibutuhkan serta *record* tertentu diproses setelah peristiwa terjadi untuk menghindari penundaan operasional. Sistem *real time* pemrosesan dilakukan ketika kegiatan ekonomi terjadi dan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan dari pada pemrosesan *batch* serta semua *record* yang berkaitan dengan peristiwa diproses segera.

Pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Hal itu disebabkan karena adanya kendala. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Sehingga berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk memastikan kelancaran penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan komputer, maka diperlukan,

- 1) Tersedianya Komputer (Laptop)

Komputer (Laptop) merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh organisasi untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis komputerisasi.

- 2) Terpasangnya Jaringan Internet

Selain kelengkapan komputer (laptop), Jaringan internet juga diperlukan untuk memastikan kelancaran penyusunan laporan keuangan.

¹⁷Nurhayati Soleha, “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan di SKPD Kabupaten Propinsi Banten”, (Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1, 2014), hal. 30

Jaringan internet dapat digunakan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.

3) Pemeliharaan Komputer

Komputer (Laptop) merupakan aset yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya pemeliharaan untuk memastikan komputer bisa bertahan dalam jangka waktu yg ditentukan.

4) Perbaikan Peralatan Yang Rusak

c. Software atau Aplikasi Akuntansi

Mesin hanya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan saja, dan yang tidak diperintahkan tidak akan dikerjakan. Mesin hanya bisa beroperasi berdasarkan data, yaitu menerima data, memprosesnya, dan mengomunikasikan hasil-hasilnya, tetapi tidak mampu secara langsung melaksanakan aktivitas fisik seperti menekuk logam atau mengikat tali misalnya. Namun demikian, informasi yang diproses oleh komputer bisa dipergunakan untuk mengontrol mesin penekuk logam ataupun pengikat tali, tetapi melaksanakan pekerjaannya itu sendiri tidak dapat dilakukan oleh komputer. Selain itu, suatu program yang nampaknya sempurna dan bekerja dengan memuaskan bisa saja menghasilkan output yang rasanya mustahil, seperti mengeluarkan faktur penagihan dengan jumlah Rp. 0,00 . Hal ini bisa terjadi, karena ada beberapa kombinasi peristiwa yang jarang terjadi yang terpaksa harus dihadapi komputer dengan suatu situasi di mana (a) komputer tidak menerima program yang digunakan untuk menyelesaikan peristiwa itu, atau (b) program yang disusun oleh programmer itu memang memiliki kelemahan dan baru terungkap setelah menghadapi peristiwa itu. Dengan demikian suatu program yang nampaknya sempurna belum tentu akan menghasilkan *output* yang sempurna, karena jika datanya salah akan berakibat *output* juga salah. Maka dari itu diperlukan adanya software atau aplikasi yang digunakan.¹⁸

¹⁸ Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1989), hal. 43-44

Aplikasi adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk tugas yang spesifik atau khusus seperti akuntansi, analisis dalam bidang sains atau medis, atau pemrosesan kata. Bagian “Aplikasi” mengacu kepada keseluruhan *set* dari program yang secara kolektif mengimplementasikan sebuah proses bisnis yang spesifik. Program-program individual yang mengimplementasikan bagian dari proses bisnis ini dikenal sebagai “program aplikasi” atau “perangkat lunak aplikasi.

Program Aplikasi siap pakai merupakan program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contoh aplikasi adalah program pemroses kata dan *web browser*. Aplikasi menggunakan sistem operasi (*OS*) komputer dan aplikasi lain yang mendukung istilah ini mulai perlahan masuk kedalam istilah Teknologi Informasi semenjak tahun 1993, yang biasanya juga disingkat dengan *app*. Secara historis aplikasi adalah *software* yang dikembangkan oleh perusahaan.

Software akuntansi merupakan program yang dibuat untuk memudahkan aktivitas dan pencatatan akuntansi. Semua rangkaian kegiatan dalam akuntansi seperti menjual, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo dan laporan keuangan dapat dikerjakan melalui program akuntansi. Dapat dikatakan bahwa kehadiran *software* akuntansi ini mampu memangkas pekerjaan seorang akuntan menjadi lebih cepat. Ada berbagai macam *software* akuntansi antara lain *MYOB*, *Accurate*, *Ms Exel (Spreadsheet)*, *Dac Easy Accounting (DEA)*, *Peachtree*, *K-System* Indonesia, *Zahir Accounting* dan khusus untuk aplikasi yang digunakan untuk sistem komputerisasi laporan keuangan pemerintahan daerah terkhususnya di desa itu menggunakan Sistem Keuangan Desa (*SISKEUDES*).

d. Kriteria Program Akuntansi Yang Berkualitas

Ada beberapa kriteria program akuntansi yang berkualitas dari sudut pandang pengguna (*user*) yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Keandalan

Keandalan menunjukkan seberapa besar program dapat diandalkan untuk melakukan sebuah proses yang dapat dipercaya dan dibutuhkan. Kriteria keandalan ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Bentuk Verifikasi

Kriteria ini menunjukkan apakah program menyediakan suatu *task* yang dapat memeriksa atau menguji kesalahan pada file data, menunjukkan kepada *user software* ini mengapa data tersebut terdapat fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pemakai untuk menguji data yang rusak atau data yang mungkin hilang.

b) Penggunaan Digit Angka

Jumlah digit yang disediakan oleh program untuk mencatat nominal transaksi.

c) Fasilitas *Audit Trial*

Fasilitas *audit trial* merupakan fasilitas yang dapat berguna untuk memeriksa atau menelusuri jejak pemakai dalam mengoperasikan program tersebut.

d) *File oriented system* atau *database oriented system*

Yang dimaksud *File oriented system* yaitu apakah setiap *file* (terdiri dari data dan program aplikasi) dikembangkan untuk mendukung kebutuhan tertentu dengan kata lain apakah program tersebut hanya mampu mengenal dan mengatur data miliknya saja.

2) Ketersediaan dan kelengkapan/*completeness*

Ketersediaan berarti apakah suatu program aplikasi telah lengkap menyediakan suatu siklus akuntansi yang standar. Kriteria ini dapat dijabarkan lebih lanjut dengan kriteria input dan output seperti dibawah ini.

a) *Input*

Input merupakan data yang masuk kedalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam

pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input.

b) *Output*

Produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada dalam sistem informasi. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan model tertentu. Biasanya output berupa laporan yang dihasilkan oleh program akuntansi berupa laporan keuangan.

c) *Keluwesan / flexibility*

Keluwesan menunjukkan bahwa sistem dalam program mudah beradaptasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan *user* yang mudah berubah.

d) *Kualitas mengonversi output laporan*

Apakah terdapat menu untuk mengonversi berbagai *output* yang dihasilkan oleh program akuntansi ke program *windows* yang lain, misal *spreadsheet* seperti *microsoft excel*. Dan Bagaimana hasil atau kualitas hasil konversi tersebut, apakah bisa langsung digunakan ataukah pemakai perlu mengedit tampilan atau format laporan tersebut. Misal pemakai mengonversi suatu laporan ke *microsoft excel*, apakah lebar kolom dan tampilan *microsoft excel* telah menyesuaikan dengan tampilan di program akuntansi yang di pakai.

e) *Syarat minimal (minimum requirement) hardware*

Kriteria ini ingin menunjukkan apakah program dapat *running* dengan sempurna (tidak menimbulkan *lag*) pada komponen perangkat keras yang telah ditentukan. Kemudahan meng-*customize* struktur atau bagan akun. Masing-masing program akuntansi biasanya akan secara otomatis membulatkan bagan akun (*chart of account*) yang baku atau standar. Kriteria ini

menunjukkan apakah program akuntansi tersebut dapat memberikan fasilitas atau kemudahan bagi pemakai untuk meng-*customize* bagian akun tersebut sesuai dengan kebutuhan pemakai.

3) Kemudahan Penggunaan atau *easy to use*

Kriteria ini dapat dilihat dari kemudahan penggunaan fitur-fitur yang ditawarkan oleh program dan tampilan dari program yang *user friendly*, sehingga pemakai tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pengoperasiannya.

4) *Support Quality*

Bagaimana dukungan perusahaan pengembang aplikasi untuk, jangka waktu ke depan (*service after sale*). Kriteria ini meliputi :

a) Fasilitas *high-quality training*

Apakah pengembang program akuntansi tersebut menyediakan program pelatihan yang berkualitas bagi pemakai yang menggunakan program akuntansi tersebut, sehingga pemakai dapat bekerja lebih efisien dan percaya diri dalam menggunakan program akuntansi tersebut.

b) *High-quality documention* secara *online*

Apakah terdapat dokumentasi yang tersedia secara *online*, misal manual *book (user guide)*, sebagai penawaran atau informasi terbaru, seputar masalah yang biasa di hadapi oleh pemakai dan bagaimana menanganinya, dan berbagai *tips* atau informasi yang dapat mendukung kebutuhan pemakai.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada

unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.¹⁹

Tuntutan reformasi manajemen keuangan daerah tidak hanya menghasilkan perubahan dalam pengelolaan keuangan internal pemerintah daerah, tetapi juga di kalangan aparat pengawas daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah dan laporan keuangan daerah, peranan Bawasda (Badan Pengawas Daerah) lebih ditekankan untuk memastikan sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar. (buku audit sektor publik indra bastian hal

Pengawasan keuangan daerah penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Objek pengawasan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan terhadap APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis serta adil dan merata.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai kandungan nilai informasi yang berkualitas.²⁰

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengartikan konsep pengawasan sebagai segala komponen baik berupa proses, elemen maupun kegiatan yang terjalin erat dan berfungsi untuk meyakinkan agar

¹⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 215.

²⁰ Muhamad Rifandi, "Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", (Jurnal Relasi No. 2, 2018), hal. 5

segala tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan menuju kearah tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan cara seefisien mungkin.

Baswir mengatakan bahwa pengawsan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Dari beberapa defenisi diatas penulis menyimpulkan, bahwa pengawasan adalah pemantauan yang dilakukan untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan apabila terdapat penyimpangan bisa langsung di koreksi.

b. Lingkungan Pengawasan

Penerapan pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian resiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian intern tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas.²¹

Lingkungan pengawasan mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern organisasi. Efektivitas bunsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian harus diberi tekanan perhatian, karena berdasarkan kenyataan, justru lingkungan pengendalian ini yang mempunyai dampak besar terhadap

²¹ Wahyu, Aswandi. *“Pengaruh Kompetensi SDM, Pemamfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang”*. (E-journal S1 Akuntansi Uneversitas Negeri Padang, 2016), hal. 4

keseriusan intern yang diterapkan di dalam organisasi. Lingkungan pengawasan memiliki beberapa unsur.²² Berikut ini akan diterangkan masing-masing unsur tersebut :

1) Filosofi dan Gaya Pemimpin

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi organisasi dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Gaya kegiatan mencerminkan ide pimpinan tentang bagaimana kegiatan suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Ada manajer yang memiliki gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja pimpinan, dan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam anggaran.

2) Metode Pengawasan

Metode pengawasan pimpinan merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pengelolaan organisasi dimulai dengan perencanaan strategik (*strategic planning*) yang didalamnya terjadi proses penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses pengelolaan organisasi kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

²² Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (ed.), *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 210-211.

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran (*role setting*) dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang peran tersebut, untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. Sumber ekonomi yang disediakan untuk memungkinkan pimpinan berperan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur berbagai sumber ekonomi yang disediakan bagi setiap manajer yang berperan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran.

Di samping program dan anggaran sebagai metode pengendalian, pelaksanaan rencana yang tertuang dalam program dan anggaran memerlukan sistem informasi akuntansi untuk mengukur konsumsi sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk dasar pelaksanaan tahap ketiga dan keempat pengendalian; pelaksanaan dan pengukuran; dan pelaporan dan analisis.

3) Kesadaran Pengawasan

Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh pimpinan dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Jika pimpinan segera melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian yang dikemukakan oleh akuntan intern atau akuntan publik, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen pimpinan terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.

c. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah terdiri atas kebijakan dan Prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan

informasi keuangan yang andal,serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.²³ Diihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengawasan keuangan daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pengawasan Akuntansi (Laporan Keuangan)

Pengawasan Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi.²⁴ Beberapa Pengawasan Akuntansi yaitu :

a) Dokumentasi bukti transaksi

Dokumentasi bukti transaksi bisa berupa Faktur, Foto , atau Kwitansi yang bisa dipertanggungjawabkan.

b) Pencatatan transaksi berdasarkan bukti

Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan dengan bukti transaksi.

c) Sistem Pengawasan Pelaksanaan Tugas

Sistem pengawasan pelaksanaan tugas dilakukan untuk memastikan semua struktur berjalan dengan semestinya.

2) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.²⁵ Beberapa pengawasan Adminisstratif yaitu :

a) Laporan Keuangan sesuai dengan Standart

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan laporan keuangan sudah sesuai dengan standart yang berlaku.

b) Evaluasi Kegiatan

²³ As Syifa, Nurillah “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemamfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*” hal. 31

²⁴ *Ibid.*, hal. 31

²⁵ *Ibid.*, hal. 31

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk memastikan semua kegiatan dilakukan dengan baik dan juga untuk mengurangi adanya kecurangan.

d. Lembaga Pengawas Keuangan Daerah

Menurut cara pelaksanaannya, Pengawasan keuangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi berikut :

1) Pengawasan oleh DPRD

DPRD memiliki kewenangan terhadap pengawasan keuangan eksternal tingkat kabupaten. Dalam pengawasan keuangan DPRD provinsi/kabupaten/kota dalam melakukannya lewat dengan pendapat, kunjungan kerja, panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk dengan peraturan tata tertib DPRD.

2) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat

Pengawasan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dibagi menjadi dua yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah lembaga pemerintahan pusat non departemen yang dibentuk lewat Keppres No. 103 Tahun 2001. BPKP bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan APBN. Untuk menjalankan tugasnya BPKP dapat melakukan audit keuangan, investigasi, dan evaluasi kerja dan manajemen organisasi.

b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Bpk adalah salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah, DPR, MA dan DPA. Dengan demikian BPK tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Bpk menjalankan fungsi pengawasan keuangan

eksternal, berbeda dengan BPKP yang melakukan pengawasan keuangan internal.

3) Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah

Pengawasan internal pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawasyang saat ini umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda)/Inspektorat.

Bawasda memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan daerah, diantaranya pengawasan terhadap pelaksana APBD, penerimaan pendapatan daerah dan badan usaha daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penyelesaian ganti rugi, inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan pemda.

Dengan demikian pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengawasan diperlukan demi terciptanya aparat pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sitem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control sosial*) yang obyektif, sehat dan bertanggungjawab.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	Irfan Ikhwanul Haza	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD pemerintah kota padang)	2011	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi dan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2	Desi Indriasari dan Erambang	Pengaruh Kapasitas	2008	Hasil analisis menunjukkan bahwa

	Naharto	Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)		Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh secara positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3	Siska Yulia Defitri	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan	2018	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, Sementara itu Sistem Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas

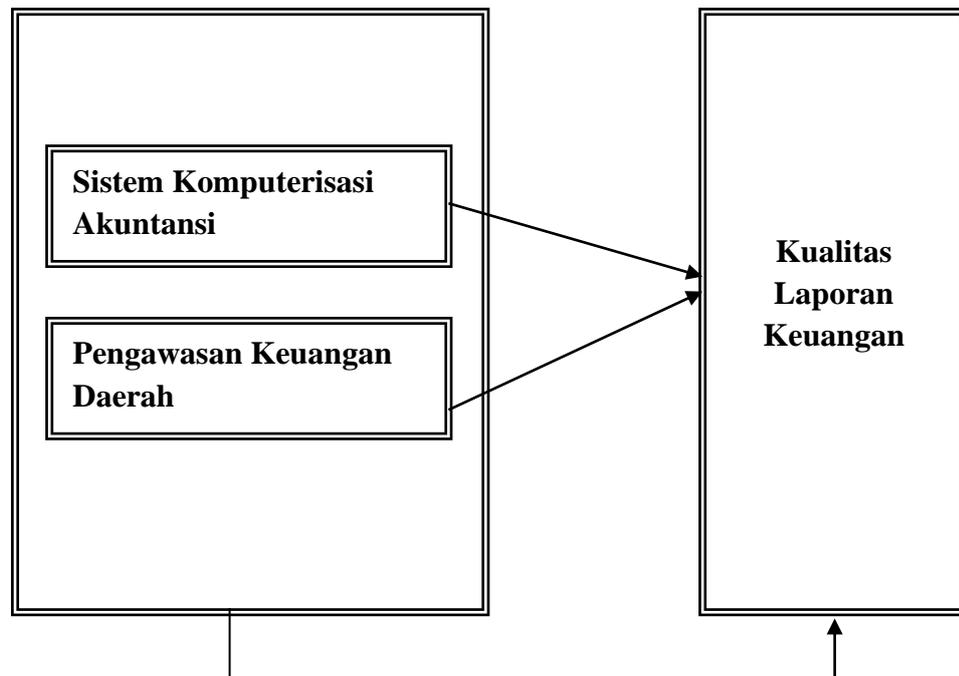
		Keuangan Pemerintah Daerah		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	Wahyu Aswandi	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang)	2016	Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dinyatakan berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan organisasi nirlaba, Semetara Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi juga berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan organisasi nirlaba, sedangkan hasil uji regresi berganda dalam penelitian tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan organisasi

				nirlaba, oleh karena itu , pengawasan bukan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan pada organisasi nirlaba.
5	Katty Aryanti Martina	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	2014	Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sementara Sistem Pengendalian Intern memiliki hubungan positif terhadap nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6	Nurhayati Soleha	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan	2014	Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Daerah dan Aktivitas Pengendalian yang memadai

		Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten		berpengaruh signifikan terhadap meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
7	Silviana	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat	2014	Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis. Sesuai dengan gambar kerangka konseptual (Gambar 2.1), maka dapat dijelaskan bahwa variabel Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

D. Hipotesa penelitian

Hipotesa dapat di defenisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang sudah diuraikan diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Sistem Komputerisasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

H₂ : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

H₃ : Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel.²⁶ Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.²⁷

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah seluruh Desa di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara yang sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengajuan Judul	19 Juli 2019
2	Bimbingan Proposal	20 Agustus s/d 10 Desember 2019
3	Seminar Proposal	23 Desember 2019
4	Bimbingan Skripsi Bab I, II dan III	1 Maret s/d 18 Mei 2020

²⁶ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 16

²⁷ Arfan Ikhsan dan Imam Ghozali, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (t.t.p: Pt. Madju Medan Cipta), hal. 10

5	Waktu Penelitian	20 Mei s/d 31 Mei 2020
6	Bimbingan Skripsi Bab IV dan V	01 Juni s/d 25 Juni 2020
7	Sidang Munaqasah	8 Juli 2020

C. Data Penelitian

1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.²⁸ Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer (*primary data*). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kusioner yang dibagikan kepada responden.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah batas dari satu obyek penelitian dan sekaligus merupakan batas bagi proses induksi (generalisasi) dari hasil penelitian yang bersangkutan.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dolok Sigompulon. Kecamatan Dolok Sigompulon terdiri dari 44 Desa. Jumlah keseluruhan pengelola unit kerja

²⁸ Ibid., hal. 103

²⁹ Ibid., hal. 110

³⁰ Sujoko Efferin, *et al*, *Meode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 73

atau pejabat struktual pada SKPD Kecamatan Dolok Sigompulon dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Jumlah SKPD Kecamatan Dolok Sigompulon

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa	44
2	Sekretaris Desa	44
3	Kaur Keuangan	44
4	Kaur Umum	44
5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	44
	Jumlah	220

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.³¹ Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Perangkat Desa yang sudah mempunyai kemampuan menyusun laporan keuangannya secara mandiri.
- b. Aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing bidangnya.
- c. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

³¹ Ibid., hal. 74

Berdasarkan kriteria sampel di atas dapat disimpulkan bahwa yang masuk ke dalam kriteria sampel dalam penelitian ini hanya 15 desa. Sehingga sampel penelitian ini dijelaskan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kelapa Desa	15
2	Sekretaris Desa	15
3	Kaur Keuangan	15
4	Kaur Umum	15
5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	15
	Jumlah	75

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan atau pertanyaan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subyek, secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu.³²

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang menggunakan angka angka sebagai berikut:

- a. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- b. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- c. Angka 3 = Ragu-Ragu (R)

³² Syahrudin dan Salim, *metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 113

- d. Angka 4 = Setuju (S)
- e. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

F. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun defenisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Kualitas laporan keuangan merupakan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini. Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.³³ Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel konsekuensi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel sistem komputerisasi akuntansi (X₁). Sistem komputerisasi akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi. Aplikasi yang digunakan dalam pengolahan akuntansi di desa adalah Siskeudes.
3. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X₃) merupakan variabel bebas kedua dalam penelitian ini. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, *equity*, dan *equality*.

Tabel 3.4

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Defenisi	Indikator	Pertanyaan
1	Variabel Terikat Kualitas	Kualitas Laporan Keuangan	1. Kelengkapan 2. Ketepatan Waktu 3. Andal	2,3, dan 4 8 1

³³ Arfan Ikhsan, *et, al, metodeologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 67

	Laporan Keuangan (Y)	adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dapat diuji 5. Dapat dibandingkan 6. Sebagai tolak ukur 7. Bebas dari Kesalahan 8. Dapat dipahami 	<p>5</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>4</p>
2	Variabel Bebas Sistem Komputerisasi Akuntansi (X₁)	Sistem komputerisasi akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer (laptop) dalam jumlah cukup 2. Terpasangnya jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan 3. Proses akuntansi secara komputerisasi 4. Software sesuai perundang- 	<p>1</p> <p>4</p> <p>7</p>

			undangan	2
			5. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi	3
			6. Pemeliharaan peralatan	5
			7. Perbaikan peralatan yang rusak	6
3	Pengawasan Keuangan Daerah (X ₂)	Pengawasan merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, <i>equity</i> dan <i>equality</i> .	1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Evaluasi kegiatan 3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti 4. Dokumentasi bukti transaksi 5. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas 6. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	3 dan 5 2 dan 6 1 1 4 7

G. Analisis Data

Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data.³⁴ Dalam proses analisis data tentunya memerlukan suatu ketajaman dan ketepatan pada penggunaannya karena hal tersebut sangat menentukan keakuratan pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah regresi berganda, karena membahas tentang dua buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 15.0.

Beberapa teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisa Deskriptif

Metode analisis deskriptif pada umumnya biasa digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Metode analisis deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang cukup besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas adalah akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Validitas dalam penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen

³⁴ Arfan Ikhsan, *et, al, metodeologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 147

pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya di ukur.³⁵ Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruktornya.

Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} .

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur, Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau *construct*. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.³⁶ Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan koefisien *cronbach's alpha*.

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *cronbach's alpha* dengan kriteria lebih besar dari 0,7 adalah reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Bila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam menguji normalitas data maka ada dua cara yang dapat digunakan yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-Sminov test* dengan tarif signifikan 5%.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka

³⁵ Ibid., hal. 158

³⁶ Ibid., hal. 91

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance Value* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* melalui program SPSS. Batas dari *Tolerance Value* adalah $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai variabel dependen (*ZPRED*) dengan nilai residual (*SRESID*). Dasar analisis ini adalah :

- 1) Titik-titik tersebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 dan data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebur kemudian menyempit dan melebur kembali.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh sistem komputerisasi akuntansi (X_1), dan pengawasan keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Rumus regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dalam hal ini adalah :

$$a = \text{Konstanta}$$

X1	= Sistem Komputerisasi Akuntansi
X2	= Pengawasan Keuangan Daerah
Y	= Kualitas Laporan
b_1, b_2	= Koefisien regresi untuk X1, X2
e	= Faktor gangguan

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.³⁷ Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.³⁸

Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji yaitu sebagai berikut :

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.³⁹

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. $t < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. $t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

³⁷ Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan: Febi Press), hal. 35

³⁸Ibid., hal. 36

³⁹ Ibid., hal. 39

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan.⁴⁰

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁴¹

⁴⁰ Ibid., hal. 37

⁴¹ Ibid., hal. 36

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon. Di kecamatan ini terdapat 44 Desa yang setiap tahun nya secara rutin mengerjakan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa di kerjakan secara bersama-sama oleh perangkat desa. Perangkat desa memiliki fungsi dan peranan masing-masing dalam melaksanakan pemerintahan desa. Pada umumnya berikut struktur dan pembagian tugas yang terdapat dalam suatu desa:

1. Kepala Desa
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan, pembangunan, dan pelestarian pembangunan di desa)
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan, dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Desa
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengeloaan APBDesa
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa

- c. Menyusun RanPerdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa
 - e. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - f. Pelaksanaan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
 - g. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakan fungsi dan tugasnya.
3. Kaur Pemerintahan
 - a. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
 - b. Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian, dan akta kematian
 - c. Pencatatan perubahan kepemilikan tanah akibat dari jual beli, hibah, pemindahan hak atas tanah, wakaf, sesuai dengan keputusan tertentu dan peraturan yang berlaku.
 - d. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 4. Kaur Umum
 - a. Mencatat semua surat keputusan pengangkatan perangkat desa dan kepala dusun
 - b. Mencatat keuangan desa yang termasuk dalam APBDesa
 - c. Mencatat seluruh kekayaan desa, investaris desa, urusan rumah tangga desa, kearsipan dan pelaporan.
 - d. Administrasi tugas pembuatan berupa pungutan PBB dan penyetorannya.
 5. Kaur Pembangunan
 - a. Mencatat urusan pembangunan, pelayanan kepada yang memerlukan SITU/SIUP/IMB
 - b. Mencatat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh swadaya masyarakat atau program pembangunan yang ada di desa
 - c. Mengembangkan perekonomian desa
 - d. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

6. Kaur Keuangan

- a. Mencatat penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran penerimaan dan belanja desa
- b. Mencatat serta melaporkan kepada kepala desa bilamana menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, Provinsi dan Pusat dengan menggunakan : Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku pembantu perincian objek penerimaan dan pengeluaran dan Administrasi pajak bumi dan bangunan, penerimaan setoran dari kepala dusun/kolektor dan menyetorkan ke Bank.

B. Deskripsi Data Penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan di ambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan oleh peneliti. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa-desa yang sudah bisa menyusun laporan keuangannya secara mandiri dengan sistem komputerisasi. Sehingga dari 44 desa yang dijadikan sebagai populasi penelitian di dapatkan 15 desa yang menjadi sampel berdasarkan kriteria kriteria yang di tetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan data primer (Kuesioner) yang diserahkan langsung kepada responden. Masing-masing desa hanya diwakilkan oleh 5 orang perangkat desa untuk mengisi kuesioner yang disebar.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa proses untuk seorang peneliti mendapatkan data sampel yang ingin diteliti. Awalnya, peneliti menyebarkan kuesionernya kepada responden secara langsung dengan mendatangi setiap desa yang sudah terdaftar sebagai objek penelitian. Selanjutnya pada akhir proses setelah kuesioner dikembalikan oleh pihak responden maka peneliti juga melakukan sedikit wawancara mengenai laporan keuangan desa dengan tujuan agar memperjelas pernyataan kuesioner yang telah di sebar. Berikut hasil penyaringan jumlah sampel penelitian:

Tabel 4.1

Hasil Penyaringan Sampel

Keterangan	Total	Persentase (%)
Sampel (15 Desa x 5 Responden)	75	100%
Desa yang bisa diakses (12 x 5)	60	80%
Kusioner dibagikan	60	100%
Kusioner yang kembali	60	100%
Kusioner yang dapat diolah	60	100%
Jumlah sampel akhir yang diteliti	60	100%

Sumber: Perhitungan jumlah sampel

Dari tabel 4.1, diketahui bahwa dari 44 sampel desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon. Sampel awal yang telah direncanakan adalah 75, akan tetapi kusioner yang bisa dibagikan hanya sekitar 60 kusioner, itu disebabkan oleh adanya tiga desa yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti dan kusioner yang kembali 100% (60 kusioner). Dari kusioner yang dikembalikan oleh responden semuanya dapat diolah dan dijadikan sebagai sampel akhir.

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Responden

Responden Berdasarkan Kategori Perangkat Desa	Total	Persentase (%)
Laki-laki	55	92%
Perempuan	5	8%

Sumber: Rekapitulasi Kusioner

Dari tabel 4.2, menunjukkan jenis kelamin responden. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 55 (92%), dan jumlah jenis kelamin perempuan 5 responden (8%)

Tabel 4.3
Kategori Responden

Responden Berdasarkan Kategori Perangkat Desa	Total	Persentase (%)
Kepala Desa	12	20%
Kaur Keuangan	12	20%
Sekretaris Desa	12	20%
Badan Permusyawaratan Desa	12	20%
Kaur Umum dan Pelayanan	12	20%

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan jumlah masing masing responden menurut kategori perangkat desa. Responden dari kategori Kepala Desa terdapat 12 responden (20%) dan Kaur Keuangan terdapat 12 responden (20%) dari kategori Sekretaris Desa terdapat 12 responden (20%) sedangkan dari kategori Badan Permusyawaratan Desa terdapat 12 responden (20%) dan dari kategori Kaur Umum dan Pelayanan terdapat 12 responden (20%).

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan responden

Tingkat Pendidikan Responden	Total	Persentase (%)
SMP	6	10%
SMA	51	85%
S1	3	5%

Sumber :Rakapitulasi Kuesioner

Pada tabel 4.4 memberikan informasi latar belakang pendidikan setiap responden. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat pendidikan S1 yang berjumlah 3 responden (5%) . Kedua,tingkat pendidikan SMA berjumlah 51 responden (85%), dan yang terakhir Pendidikan tingkat SMP berjumlah 6 responden (10%) .

Tabel 4.5
Tingkat Usia Responden

Tingkat Usia Responden (Tahun)	Total	Persentase (%)
< 25	2	3%
25 - 35	43	72%
36 - 45	13	22%
46 – 55	2	3%

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner

Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan tingkat Usia setiap responden. Usia responden < 25 tahun berjumlah 2 responden (3%), Usia dengan kisaran umur 25-35 berjumlah 42 responden (72%), Responden dengan kisaran umur 36-45 berjumlah 13 responden (22%) dan Usia dengan kisaran 46-55 berjumlah 2 responden (3%).

Tabel 4.6
Lama Bekerja

Lama Bekerja (Tahun)	Total	Persentase (%)
1 - 5	49	82%
6 - 10	10	17%
11 – 15	1	1%

Sumber: Rekapitulasi Kuesioner

Pada Tabel 4.6 menunjukkan informasi lama bekerja responden. Lama bekerja dengan kisaran 1-5 tahun berjumlah 49 responden (82%), dan dari kisaran 6-10 tahun bekerja berjumlah 10 responden (17%), sedangkan responden dengan kisaran 11-15 tahun berjumlah 1 (1%).

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif memberikan informasi atau gambaran terkait dengan data yang terdiri dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness.

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	60	28	35	29,90	2,532
Sistem Komputerisasi Akuntansi (X1)	60	26	35	29,17	2,480
Pengawasan Keuangan Daerah (X2)	60	27	35	29,30	3,502
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Output SPSS.v.22.0

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 67 dengan 3 variabel. Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai rata-rata 29,90 dengan simpangan baku 2,532. Nilai rata-rata variabel Sistem Komputerisasi Akuntansi adalah 29,17 dan simpangan baku 2,480. Terakhir ada variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki rata-rata 29,30 dengan simpangan baku 3,502.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan agar dapat mengukur valid atau sah tidaknya kuesioner yang diolah. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai r table dengan r hitung setiap item pertanyaan. Jika r hitung $>$ r table, maka data dapat dikatakan valid.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No Item	r hitung	R tabel 5% (60)	Sig	Kriteria
1	0,675	0,250	0,000	Valid
2	0,656	0,250	0,000	Valid
3	0,670	0,250	0,000	Valid
4	0,285	0,250	0,000	Valid
5	0,328	0,250	0,000	Valid
6	0,498	0,250	0,000	Valid
7	0,642	0,250	0,000	Valid

*Sumber: Perbandingan nilai***Tabel 4.9**

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Komputerisasi Akuntansi

No Item	r hitung	R tabel 5% (60)	Sig	Kriteria
1	0,613	0,250	0,000	Valid
2	0,564	0,250	0,000	Valid
3	0,615	0,250	0,000	Valid
4	0,470	0,250	0,000	Valid
5	0,455	0,250	0,000	Valid
6	0,518	0,250	0,000	Valid
7	0,648	0,250	0,000	Valid

*Sumber: Perbandingan nilai***Tabel 4.10**

Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

No Item	r hitung	R tabel 5% (60)	Sig	Kriteria
1	0,757	0,250	0,000	Valid
2	0,613	0,250	0,000	Valid
3	0,691	0,250	0,000	Valid
4	0,389	0,250	0,000	Valid
5	0,479	0,250	0,000	Valid
6	0,706	0,250	0,000	Valid

7	0,710	0,250	0,000	Valid
---	-------	-------	-------	-------

Sumber: Perbandingan nilai

Dari tabel 4.8 tabel 4.9 dan tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji validitas masing-masing item pernyataan variabel tiap variabel memiliki nilai r hitung yang diperoleh dari perhitungan statistik $>$ nilai r tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara keseluruhan seluruh item variabel Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk pengujian lainnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan sebuah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau item pernyataan. Dikatakan andal atau reliabel suatu kuesioner jikalau jawaban seseorang adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji ini pun dapat dilakukan setelah diuji keshahihan dengan cara uji validitas. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *cronbach's alpha* setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan SPSS. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60.

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,626	,611	7

Sumber: Output SPSS.V.22.0

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Komputerisasi Akuntansi

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,613	,637	7

Sumber: Output SPSS.v.22.0

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,744	,742	7

Sumber : Output SPSS.V.22.0

Dari tabel 4.11, tabel 4.12, dan tabel 4.13 menunjukkan hasil masing-masing sebagai berikut. Pertama Tabel 4.11 diperoleh nilai $0,626 > 0,60$, Kedua tabel 4.12 diperoleh nilai $0,613 > 0,60$ dan yang Ketiga dari tabel 4.13 diperoleh nilai $0,744 > 0,60$. Oleh Karena itu, ke-7 item dalam kuesioner sudah teruji reliabilitasnya untuk membentuk variabel Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah dan dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Suatu regresi dengan menggunakan metode estimasi *Ordinary least Squares* (OLS) akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) jika memenuhi semua asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.

a. Uji Normalitas

Untuk Menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal maka harus di uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan aplikasi software statistik SPSS v. 22.0.

Tabel 4.14
 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,70713670
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,054
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS v.22.0

Dari Tabel 4.14 hasil uji normalitas di atas menunjukkan hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Dari nilai yang ditunjukkan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada pengujian ini sudah berdistribusi normal. Hal ini bisa dibuktikan dari nilai dan signifikansi variabel yang $>$ nilai Alpha (0,05). Di mana nilai dan signifikansi variabel yaitu $0,2 > 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk membuktikannya, peneliti menggunakan cara dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nantinya model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF \leq dari 10. Berikut hasil pengujian multikolinieritas.

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc	VIF
						e	
1 (Constant)	4,761	1,751		2,720	,009		
SKA	,321	,104	,335	3,089	,003	,311	3,212
PKD	,527	,097	,591	5,440	,000	,311	3,212

a. Dependent Variable: TY

Sumber: Output SPSS v.22.0

Pada Tabel 4.15 terlihat hasil uji multikolinearitas. Hasil yang diperoleh dari kedua variabel (SKA dan PKD) adalah tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *Tolerance* setiap variabel $> 0,01$ dan nilai VIF-nya < 10 . Di mana nilai *Tolerance* masing-masing variabel adalah SKA 0,311 dan PKD 0,311. Sedangkan nilai VIF-nya masing masing adalah SKA 3,212 dan PKD 3,212.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapaun pada penelitian ini uji yang digunakan adalah Uji Glejser. Pada metode pengujian ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi setiap variabel $>$ nilai alpha (0,05), maka dalam model regresi, variansnya bersifat homogen.

Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	1,297	,954				1,359
SKA	,015	,057	,062	,265	,792	,311	3,212
PKD	-,039	,053	-,175	-,741	,462	,311	3,212

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output SPSS v.22.0

Pada tabel 4.16 terlihat bahwa hasil regresi dari variabel SKA dan PKD terhadap nilai *absolut residual*. Nilai Signifikasi setiap variabel dari pengujian ini > nilai *alpha* (0,05) di mana masing-masing dari nilai signifikasinya yaitu SKA 0,792 dan PKD 0,462 . Dengan demikian, model regresi ini pastinya sudah bebas dari heteroskedastisitas. Dengan kata lain, variansnya residualnya bersifat sama (homogen).

4. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji regresi untuk menguji hipotesis-hipotesisnya. Adapun uji regresi yang dilakukan adalah uji regresi linear berganda, yaitu untuk menguji variabel-variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependen. Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1,2 dan 3 yang telah diajukan pada bab sebelumnya.

Tabel 4.17
 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,761	1,751		2,720	,009
SKA	,321	,104	,335	3,089	,003
PKD	,527	,097	,591	5,440	,000

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Output SPSS v. 22.0

Berdasarkan dari hasil tabel 4.17 rumus regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = 4,761 + 0,321X_1 + 0,527X_2 + e$$

Dalam hal ini adalah :

- a = Konstanta
- X_1 = Sistem Komputerisasi Akuntansi
- X_2 = Pengawasan Keuangan Daerah
- Y = Kualitas Laporan
- b_1, b_2 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2
- e = Faktor gangguan

- a. Konstanta bernilai sebesar 4,761 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan. Angka tersebut bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Koefisien regresi Sistem Komputerisasi Akuntansi sebesar 0,321 dan bernilai positif. Hal ini menyatakan bahwa variabel sistem

komputerisasi akuntansi menunjukkan arah yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

- c. Koefisien regresi Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,527 dan bernilai positif . Hal ini menyatakan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah menunjukkan arah yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik dapat dilihat pada tabel *coefficient* (β) yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t statistik ini pun dibutuhkan untuk menguji seberapa besar variabel bebas yakni sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.18

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,761	1,751		2,720	,009
SKA	,321	,104	,335	3,089	,003
PKD	,527	,097	,591	5,440	,000

a. Dependent Variable: KLK

Sumber: Output SPSS v. 22.0

1) Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil Koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel sistem komputerisasi akuntansi (X1) mempunyai t hitung sebesar 3,089 lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 2,002 atau dapat dikatakan variabel sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. H_1 diterima, hal ini dapat disimpulkan sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil Koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah (X2) mempunyai t hitung sebesar 5,440 lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel sebesar 2,002 atau dapat dikatakan variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat signifikansi $0,000 > 0,05$. H_2 diterima, hal ini dapat disimpulkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Berdasarkan hasil uji parsial di atas menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah memberikan pengaruh lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan dengan persentase sebesar 64 %, dan variabel sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan persentase sebesar 36 %.

b. Uji Simultan (F)

Uji F statistik pada intinya yaitu menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengaruhnya pembuktiannya dapat dilakukan dengan

cara membandingkan besar nilai F hitung dengan Nilai F tabel. Jika Nilai F hitung > dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.19

Hasil Uji Simultan (F)

Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111,431	2	55,715	107,644	,000 ^b
	Residual	29,502	57	,518		
	Total	140,933	59			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), PKD, SKA

Sumber: Output SPSS v.22.0

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000 dan nilai F hitung 107,644. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 3,16, maka dengan itu H_0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menemukan besarnya tingkat kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Angka yang menjadi acuan koefisien determinasi adalah nilai *R Square*.

Tabel 4.20

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,889 ^a	,791	,783	,719	1,693

a. Predictors: (Constant), PKD, SKA

b. Dependent Variable: KLIK

Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,791. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel bebas yaitu Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah mampu menerangkan variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan sebesar 79,1 %, sisanya 20,9 % dijelaskan oleh variabel di luar model.

6. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih mendalam akan di uraikan dalam poin-poin berikut ini:

a. Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan variabel sistem komputerisasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah $0,003 < 0,05$ dengan koefisien 3,089. Hal ini berarti sistem komputerisasi akuntansi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar pemanfaatan sistem komputerisasi akuntansi maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah desa akan semakin baik pula. Dan juga sebaliknya bahwa akan banyak ditemukan masalah dalam laporan keuangan apabila tingkat pemanfaatan sistem komputerisasi akuntansi berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem komputerisasi akuntansi yang diterapkan oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon sudah dilakukan dengan dengan maksimal terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Sehingga dugaan awal bahwa sistem komputerisasi akuntansi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan berhasil dibuktikan. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Irfan Ikhwanul Haza memperoleh hasil bahwa sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan variabel pengawasan Keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah $0,000 < 0,05$ dengan koefisien 5,440. Hal ini berarti pengawasan keuangan daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin bagus pengawasan keuangan daerah maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah desa akan semakin baik pula. Dan juga sebaliknya bahwa akan banyak ditemukan masalah dalam laporan keuangan apabila pengawasan keuangan daerah berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh pengawas desa dan daerah pada desa-desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon sudah dilakukan dengan maksimal. Sehingga dugaan awal bahwa pengawasan keuangan daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan berhasil dibuktikan. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Irfan Ikhwanul Haza memperoleh hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Sistem Komputerisasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang telah dilakukan bahwa secara simultan variabel sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada desa-desa yang ada di kecamatan dolok sigompulon

Hal ini berarti bila sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan secara keseluruhan pada desa-desa yang ada di kecamatan dolok sigompulon maka pasti akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengawasan keuangan daerah memberikan pengaruh lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan peneliti menyatakan sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SPSS v.22.0 diketahui nilai t statistik sebesar $3,089 > 2,002$. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem komputerisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan persentase pengaruh sebesar 36 %.
3. Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan peneliti menyatakan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SPSS v.22.0 diketahui nilai t statistik sebesar $5,440 < 2,002$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan persentase pengaruh sebesar 64 %.
4. Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan peneliti menyatakan sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SPSS v.22.0 diketahui nilai F statistik sebesar $107,644 > 3,16$. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem komputerisasi akuntansi dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah khususnya desa-desa yang ada di kecamatan dolok sigompulon, diharapkan untuk lebih meningkatkan kompleksitas penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disebutkan dalam PP No. 71/2010 yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
2. Pemerintah desa diharapkan menyediakan laporan keuangan sesuai dengan Permendagri no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintahan desa harus senantiasa melengkapi kebutuhan komputer (laptop), karena merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan selalu melakukan pemeliharaan secara rutin agar aset tersebut dapat memiliki umur manfaat yang lama.
4. Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan software aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES dan saya mengharapkan pemerintah daerah membuat pelatihan secara rutin kepada perangkat desa tentang penggunaan aplikasi SISKEUDES tersebut.
5. Pengawasan keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Sehingga diharapkan seluruh aspek dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa.
6. Penelitian selanjutnya lebih memperluas populasi dan sampel penelitian untuk meneliti di beberapa kecamatan dan kabupaten sehingga terhadap hasil yang diperoleh dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan lebih representatif.

7. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menguji variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, internal audit serta variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hall, James. *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Aswandi, Wahyu. 2016. “*Pengaruh Kompetensi SDM, Pemamfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang*”. E-journal S1 Akuntansi Uneversitas Negeri Padang
- Bastian, Indra, dan Gatot Soepriyanto (ed.). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Efferin, Sujoko., et al, *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Harmain, Hendra. et, al, *Pengantar Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016
- Haza, Irfan Ikhwanul. 2011. “ *Pengaruh Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota Padang)*”. Artikel S1 Universitas Negeri Padang
- H. Bodnar, George., and William S. Hopwood. *Accounting Information Systems Ninth Edition*, Ter. Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati, Yogyakarta: Andi, 2006
- H. Bodnar, George., dan William S. Hopwood (ed.) *Sistem Informasi Akuntansi*, t.t.p: Pt. Indeks, 2003
- H. Timotius, Kris.,. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2017

- Ikhsan, Arfan., dan Imam Ghozali, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*, t.t.p: Pt. Madju Medan Cipta.
- Ikhsan, Arfan., *et, al, metodeologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media, 2014
- Kusmilawati. *et al, Analisa Laporan Keuangan*, Medan: Madenatera, cet 2, 2018
- Martani, Dwi. *et, al, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, cet 2, 2017
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Martina, Katty Aryanti. 2014. “*Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*”. E-journal Universitas Komputer Indonesia
- Nasution, Muhammad Irwan Padli. 2014.”*Keunggulan Kompetitif dengan Teknologi Informasi*”. Jurnal Elektronik
- Nordiawan, Deddi.,Iswahyudi Sondi Putra. dan Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan* .Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Rifandi, Muhamad. “*Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. Jurnal Relasi No. 2
- Syahrum., dan Salim, *metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Syafina, Laylan. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, Medan: Febi Press

Soleha, Nurhayati. 2014. "*Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan di SKPD Kabupaten Propinsi Banten*". Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1

Silviana. 2014. "*Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat*". Jurnal Profita Vol. 6 No. 1

Widjajanto, Nugroho,. *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Iniversitas Indonesia, 1989.

Lampiran I
Daftar Responden dari 12 Desa Kecamatan Dolok Sigompulon

No	Jabatan	Alamat
1	Kepala Desa	Desa Salusuhan
2	Sekretaris Desa	Desa Salusuhan
3	Kaur Keuangan	Desa Salusuhan
4	Kaur Umum	Desa Salusuhan
5	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Salusuhan
6	Kepala Desa	Desa Sunut
7	Sekretaris Desa	Desa Sunut
8	Kaur Keuangan	Desa Sunut
9	Kaur Umum	Desa Sunut
10	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Sunut
11	Kepala Desa	Desa Pasar Simundol
12	Sekretaris Desa	Desa Pasar Simundol
13	Kaur Keuangan	Desa Pasar Simundol
14	Kaur Umum	Desa Pasar Simundol
15	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Pasar Simundol
16	Kepala Desa	Desa Simangambat
17	Sekretaris Desa	Desa Simangambat
18	Kaur Keuangan	Desa Simangambat
19	Kaur Umum	Desa Simangambat
20	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Simangambat
21	Kepala Desa	Desa Kuala Simpang
22	Sekretaris Desa	Desa Kuala Simpang
23	Kaur Keuangan	Desa Kuala Simpang
24	Kaur Umum	Desa Kuala Simpang
25	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Kuala Simpang
26	Kepala Desa	Desa Padang Matinggi GNT
27	Sekretaris Desa	Desa Padang Matinggi GNT
28	Kaur Keuangan	Desa Padang Matinggi GNT
29	Kaur Umum	Desa Padang Matinggi GNT
30	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Padang Matinggi GNT
31	Kepala Desa	Desa Pasar Sayur Matinggi
32	Sekretaris Desa	Desa Pasar Sayur Matinggi
33	Kaur Keuangan	Desa Pasar Sayur Matinggi
34	Kaur Umum	Desa Pasar Sayur Matinggi
35	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Pasar Sayur Matinggi

36	Kepala Desa	Desa Pamonoran
37	Sekretaris Desa	Desa Pamonoran
38	Kaur Keuangan	Desa Pamonoran
39	Kaur Umum	Desa Pamonoran
40	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Pamonoran
41	Kepala Desa	Desa Batu Hibul
42	Sekretaris Desa	Desa Batu Hibul
43	Kaur Keuangan	Desa Batu Hibul
44	Kaur Umum	Desa Batu Hibul
45	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Batu Hibul
46	Kepala Desa	Desa Simadihon
47	Sekretaris Desa	Desa Simadihon
48	Kaur Keuangan	Desa Simadihon
49	Kaur Umum	Desa Simadihon
50	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Simadihon
51	Kepala Desa	Desa Gadung Holbung
52	Sekretaris Desa	Desa Gadung Holbung
53	Kaur Keuangan	Desa Gadung Holbung
54	Kaur Umum	Desa Gadung Holbung
55	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Gadung Holbung
56	Kepala Desa	Desa Pamarai
57	Sekretaris Desa	Desa Pamarai
58	Kaur Keuangan	Desa Pamarai
59	Kaur Pelayanan dan Umum	Desa Pamarai
60	Badan Permusyawaratan Daerah	Desa Pamarai

Lampiran II
Lampiran Data Kusioner

No	VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)							Total Y	VARIABEL SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI (X1)							Total X1	VARIABEL PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (X2)							Total X2
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	5	4	3	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	4	4	4	5	32	5	5	5	4	4	4	4	31	5	4	5	4	4	4	5	31
6	4	5	5	4	4	4	5	31	4	4	5	4	5	4	5	31	5	4	4	5	4	4	5	31
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	5	5	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
10	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	5	30
11	5	5	5	4	4	4	4	31	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	5	30
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	5	5	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	4	29
14	4	5	5	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	5	4	4	4	4	31
15	4	4	5	4	4	4	4	29	5	5	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	5	29
16	4	5	4	4	4	4	4	29	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	5	5	4	4	4	4	31	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	5	4	4	4	5	31
18	4	5	5	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	5	4	4	4	4	30

19	4	5	5	4	4	4	4	30	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	5	30
20	4	4	5	4	4	4	5	30	4	4	4	4	5	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
21	5	5	5	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	4	28
22	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	5	4	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	29
23	5	5	4	4	5	4	4	31	5	5	5	4	4	4	4	31	5	4	4	4	5	4	4	30
24	4	4	5	5	5	4	5	32	5	5	5	4	4	4	5	32	5	5	4	4	5	4	4	31
25	4	5	5	4	4	4	4	30	5	5	5	3	4	4	4	30	5	4	5	3	4	4	4	29
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
27	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
28	5	5	5	4	4	4	4	31	5	4	5	4	4	4	4	30	5	4	4	4	4	4	5	30
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
30	4	5	5	4	4	4	4	30	4	5	4	4	4	4	4	29	5	5	5	4	4	4	4	31
31	4	4	4	4	4	4	4	28	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	4	5	4	4	4	4	29	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	5	5	4	4	4	4	30	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29
35	5	5	5	4	4	4	4	31	5	5	4	5	4	4	4	31	5	4	4	4	4	4	5	30
36	4	5	5	4	4	4	4	30	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28
37	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28
38	5	5	5	5	4	4	5	33	5	4	5	4	4	4	5	31	5	4	5	4	4	5	5	32
39	4	5	4	4	4	4	5	30	4	4	4	4	4	4	5	29	5	4	4	4	4	4	5	30
40	5	4	5	4	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	29	5	5	4	4	4	4	5	31
41	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
42	5	5	5	4	4	4	5	32	4	4	5	4	5	4	5	31	5	4	5	4	4	5	5	32
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	5	3	4	4	4	29	4	4	4	5	4	4	4	29

44	4	4	4	5	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
45	4	4	5	4	4	4	5	30	5	5	5	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	5	29
46	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
47	5	5	5	4	4	4	4	31	5	5	5	4	4	5	5	33	5	4	4	4	4	5	5	31
48	5	5	4	4	5	4	4	31	5	5	5	4	5	4	4	32	5	4	5	4	4	4	5	31
49	5	5	5	5	4	4	4	32	5	5	4	4	5	4	5	32	5	4	5	4	4	4	5	31
50	4	4	5	4	4	4	4	29	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	4	4	4	28
51	4	5	5	4	4	4	4	30	5	5	4	4	5	4	4	31	4	4	4	4	4	5	5	30
52	5	5	5	4	4	5	5	33	5	5	5	4	5	5	5	34	5	5	5	5	5	5	5	35
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
55	5	5	5	4	4	5	5	33	5	5	5	5	4	4	5	33	5	5	5	4	5	5	5	34
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	4	4	4	29
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28
58	5	4	5	4	5	5	5	33	4	5	4	5	5	5	5	33	5	4	5	4	5	5	5	33
59	5	5	5	4	4	5	5	33	5	5	5	4	5	4	5	33	5	5	5	5	4	5	5	34
60	4	4	5	4	4	5	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30	5	4	5	4	4	4	4	30

Lampiran III
Hasil Olah Data SPSS V. 22.0

A. Uji Validitas

		Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	TY
Y1	Pearson Correlation	1	,459**	,177	,074	,213	,271*	,225	,675**
	Sig. (2-tailed)		,000	,177	,574	,103	,036	,084	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Y2	Pearson Correlation	,459**	1	,433**	-,009	-,009	,050	,150	,656**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,946	,946	,703	,252	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Y3	Pearson Correlation	,177	,433**	1	,099	-,036	,264*	,353**	,670**
	Sig. (2-tailed)	,177	,001		,452	,785	,042	,006	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Y4	Pearson Correlation	,074	-,009	,099	1	,196	-,081	,200	,285*
	Sig. (2-tailed)	,574	,946	,452		,133	,541	,125	,027
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Y5	Pearson Correlation	,213	-,009	-,036	,196	1	,161	,200	,328*
	Sig. (2-tailed)	,103	,946	,785	,133		,219	,125	,010
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Y6	Pearson Correlation	,271*	,050	,264*	-,081	,161	1	,452**	,498**
	Sig. (2-tailed)	,036	,703	,042	,541	,219		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
Y7	Pearson Correlation	,225	,150	,353**	,200	,200	,452**	1	,642**
	Sig. (2-tailed)	,084	,252	,006	,125	,125	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
TY	Pearson Correlation	,675**	,656**	,670**	,285*	,328*	,498**	,642**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,027	,010	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TX1
X1.1	Pearson Correlation	1	,401**	,364**	,183	-,042	,076	,121	,613**
	Sig. (2-tailed)		,002	,004	,161	,753	,561	,356	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	,401**	1	,175	,190	,017	,215	,005	,564**
	Sig. (2-tailed)	,002		,181	,146	,899	,100	,967	,000

N		60	60	60	60	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	,364**	,175	1	-,040	,118	,184	,450**	,615**
	Sig. (2-tailed)	,004	,181		,762	,370	,160	,000	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X1.4	Pearson Correlation	,183	,190	-,040	1	,149	,231	,271*	,470**
	Sig. (2-tailed)	,161	,146	,762		,257	,075	,036	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X1.5	Pearson Correlation	-,042	,017	,118	,149	1	,296*	,409**	,455**
	Sig. (2-tailed)	,753	,899	,370	,257		,022	,001	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X1.6	Pearson Correlation	,076	,215	,184	,231	,296*	1	,436**	,518**
	Sig. (2-tailed)	,561	,100	,160	,075	,022		,000	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X1.7	Pearson Correlation	,121	,005	,450**	,271*	,409**	,436**	1	,648**
	Sig. (2-tailed)	,356	,967	,000	,036	,001	,000		,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
TX1	Pearson Correlation	,613**	,564**	,615**	,470**	,455**	,518**	,648**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N		60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TX2	
X2.1	Pearson Correlation	1	,363**	,528**	,059	,222	,294*	,553**	,757**
	Sig. (2-tailed)		,004	,000	,656	,088	,023	,000	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X2.2	Pearson Correlation	,363**	1	,368**	,301*	,398**	,316*	,154	,613**
	Sig. (2-tailed)	,004		,004	,019	,002	,014	,239	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X2.3	Pearson Correlation	,528**	,368**	1	,027	,176	,429**	,323*	,691**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004		,841	,179	,001	,012	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X2.4	Pearson Correlation	,059	,301*	,027	1	,137	,276*	,231	,389**
	Sig. (2-tailed)	,656	,019	,841		,297	,033	,076	,002
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X2.5	Pearson Correlation	,222	,398**	,176	,137	1	,360**	,092	,479**
	Sig. (2-tailed)	,088	,002	,179	,297		,005	,483	,000
N		60	60	60	60	60	60	60	60
X2.6	Pearson Correlation	,294*	,316*	,429**	,276*	,360**	1	,515**	,706**

	Sig. (2-tailed)	,023	,014	,001	,033	,005		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.7	Pearson Correlation	,553**	,154	,323*	,231	,092	,515**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000	,239	,012	,076	,483	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
TX2	Pearson Correlation	,757**	,613**	,691**	,389**	,479**	,706**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,626	,611	7

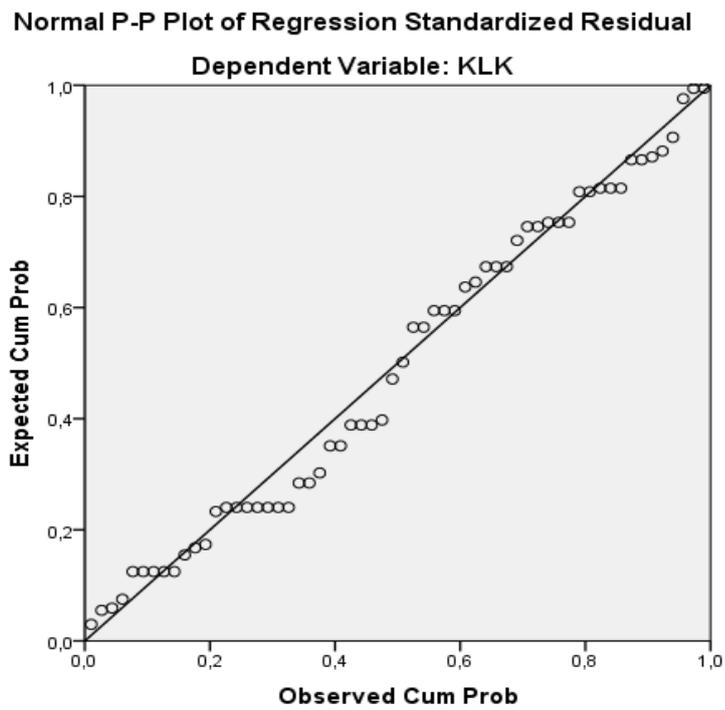
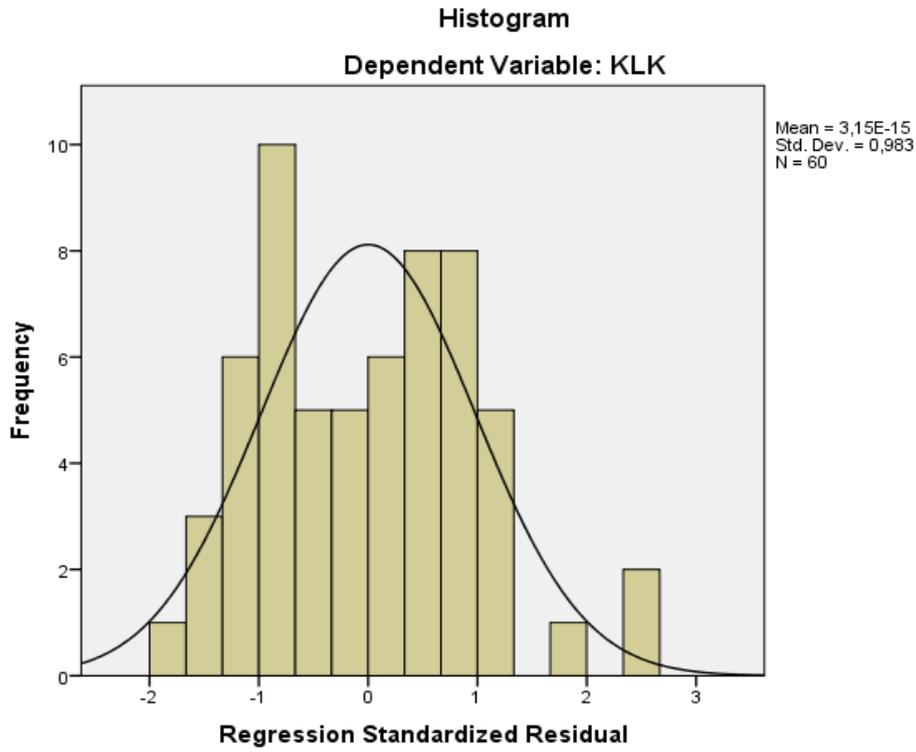
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,613	,637	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,744	,742	7

C. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,70713670
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,054
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

D. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,761	1,751		2,720	,009		
	SKA	,321	,104	,335	3,089	,003	,311	3,212
	PKD	,527	,097	,591	5,440	,000	,311	3,212

- a. Dependent Variable: KLK

E. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,297	,954		1,359	,180		
	SKA	,015	,057	,062	,265	,792	,311	3,212
	PKD	-,039	,053	-,175	-,741	,462	,311	3,212

- a. Dependent Variable: RES2

F. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,761	1,751		2,720	,009		
	SKA	,321	,104	,335	3,089	,003	,311	3,212
	PKD	,527	,097	,591	5,440	,000	,311	3,212

a. Dependent Variable: KLK

G. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111,431	2	55,715	107,644	,000 ^b
	Residual	29,502	57	,518		
	Total	140,933	59			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), PKD, SKA

H. Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,889 ^a	,791	,783	,719	1,693

a. Predictors: (Constant), PKD, SKA

b. Dependent Variable: KLK

Lampiran V

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Desa yang Ada Di Kecamatan Dolok Sigompulon)

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon Memberi Tanda *checklist* (v) pada jawaban yang bapak/ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
3. Keterangan alternatif jawaban dan skor:
 - a. SS = Sangat Setuju (5)
 - b. S = Setuju (4)
 - c. R = Ragu-Ragu (3)
 - d. TS = Tidak Setuju (2)
 - e. STS = Sangat Tidak Setuju (1)

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pendidikan Terakhir :
 - a. Tidak Tamat SD Sederajat
 - b. SD Sederajat
 - c. SMP sederajat
 - d. SMA Sederajat
 - e. Sarjana Strata 1
4. Jabatan :
5. Lama Bekerja :
 - a. 1 - 5 Tahun
 - b. 6 - 10 Tahun
 - c. 11 - 15 Tahun
 - d. 16 - 20 Tahun

- e. > 20 Tahun
- 6. Usia Anda Saat Ini :
 - a. < 25 Tahun
 - b. 25 - 35 Tahun
 - c. 36 - 45 Tahun
 - d. 46 - 55 Tahun
 - e. > 55 Tahun

VARIABEL SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI (X₁)						
No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Dalam melaksanakan tugas sebagian akuntansi/ keuangan memiliki komputer (laptop) yang cukup					
2	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
3	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
4	Jaringan internet terpasang dan dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
5	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur					
6	Peralatan yang usang/ rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya					
7	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi					

VARIABEL PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (X₂)						
No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
2	Terdapat evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan					

	datang					
3	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah					
4	Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan					
5	Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang					
6	Terdapat pembinaan pengelolaan keuangan daerah					
7	APBD telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan					

VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)						
No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan harus tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
2	Neraca dan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan harus di sajikan					
3	Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD harus disajikan.					
4	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal jika dapat diuji.					
5	Rekonsiliasi antara catatan akuntansi dengan catatan bank sebaiknya dilakukan secara periodik					
6	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak boleh berpihak pada kebutuhan pihak tertentu					
7	Informasi yang dibutuhkan harus segera tersedia ketika diminta.					